MAKALAH PENELITIAN & KAJIAN KEBIJAKAN
RESEARCH AND POLICY REVIEW PAPER

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DI KOTA PASURUAN - JAWA TIMUR

SUGIARTI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan
DIETRIECH. G. BENGEN
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor
E-mail: dieter@indo.net.id
dan
ROKHMIN DAHURI
Direktur Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada bulan April - Agustus 1999 di wilayah pesisir Pasuruan, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)Mengevaluasi kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, (2)Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, (3)Mengetahui persepsi pemerintah, swasta dan masyarakat berkaitan dengan penentuan prioritas penggunaan lahan, (4)Menentukan prioritas penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, (5)Menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, dan (6) Memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan. Dalam mengevaluasi kesesuaian lahan digunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), dan untuk menyelesaikan konflik penggunaan lahan digunakan metode Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process -AHP). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian optimal dalam pemanfaatan sumberdaya di Desa Gadingrejo direkomendasikan untuk kawasan industri, sementara desa Trajeng direkomendasikan untuk industri dan bantaran sungai.

Kata-kata kunci: Sistem Informasi Geografis, Proses Hierarki Analitik , Pasuruan, wilayah pesisir

ABSTRACT

This research was conducted in April - August 1999 in Pasuruan coastal zone, East Java. This research aimed to (1) Evaluate land suitability in space exploitation of coastal zone, (2) Analyse the causal factors of land use conflict of coastal resources management, (3) Assess the perception of government, private and communities in determining land use priority, (4) Determine the optimal land use priorities in coastal area, (5) Solve conflicts of the resource exploitation in the coastal zone, and (6) Make recommendations to decisions-makers with respect to coastal land use policy. For evaluating land suitability a Geographic Information System (GIS) was used, and for resolving land use conflict the Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used. The results showed that the optimal solution for resources exploitation in Gadingrejo village should be to industrial uses, while in Trajeng village it is recommended that industrial and embankment areas be developed.

Keywords: Geographic Information System (GIS) , Analytical Hierarchy Process (AHP), Pasuruan, coastal zone

PENDAHULUAN

Arah pembangunan yang dilaksanakan di daerah selama ini masih terkonsentrasi di daratan, sehingga tekanan kegiatan pembangunan di darat akan semakin tinggi oleh proses pembangunan. Kondisi demikian sangat dirasakan di Kota Pasuruan yang memiliki daya dukung lahan dan potensi sumberdaya daratan yang terbatas. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir Kota Pasuruan seluas 1.244 ha merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi pengembangan pembangunan daerah, dan menjadi salah satu tumpuan harapan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa mendatang (Anonymous, 1998).

Pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kota Pasuruan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang oleh berbagai pengguna lahan (*stakeholders*) yang mempunyai perbedaan kepentingan, sehingga dapat memicu terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang. Agar pengembangan pembangunan di wilayah pesisir Kota Pasuruan dapat mengakomodir kebutuhan nyata masyarakat, maka diperlukan suatu analisis kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan pemanfaatan ruang dan penetapan kawasan yang optimal dan proporsional untuk berbagai pengguna lahan (*stakeholders*) yang berkepentingan.

Perumusan masalah

Kota Pasuruan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yang dikelilingi oleh *hinterland* kota yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan merupakan daerah yang potensial untuk kegiatan industri, pertanian, perikanan dan konservasi.

Berdasarkan arahan Rencana Induk Kota (RIK) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Pasuruan, serta hukum dan peraturan perundang - undangan yang ada dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, maka permasalahan utama yang terjadi dalam pemanfaatan ruang di wilayah studi adalah konflik penggunaan lahan / pemanfaatan lahan dan alih fungsi (konversi) lahan, penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

a) Apakah pemanfaatan ruang yang ada telah sesuai dengan kesesuaian lahannya ?
b) Faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang ?
c) Bagaimana persepsi pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap konflik penggunaan lahan yang terjadi ?
d) Kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi ?

Tujuan dan manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk :

a) Mengevaluasi kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
b) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.
c) Mengetahui persepsi pemerintah, swasta dan masyarakat berkaitan dengan penentuan prioritas penggunaan lahan.
d) Menentukan prioritas penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
e) Memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambil keputusan dalam penentuan kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam penentuan kebijakan penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, serta sebagai acuan teknis dalam menetapkan peruntukan suatu kawasan pesisir dan pemanfaatan ruang serta pengendaliannya.

Kerangka pendekatan

Berdasarkan karakteristik dan dinamika dari kawasan pesisir, potensi dan permasalahan pembangunan serta kebijakan pemerintah untuk sektor kelautan, maka dalam upaya mencapai pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan, dituntut pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Hal ini sangat beralasan bila dikaji secara empiris, dimana terdapat keterkaitan ekologis atau hubungan fungsional antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antar kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya (Bengen, 2000). Pada prinsipnya pengelolaan wilayah pesisir berkaitan erat dengan faktor lingkungan ekologis, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial yang saling berhubungan satu sama lain, dan diatur melalui hukum, aturan-aturan lokal dan tradisi. Timbulnya masalah dalam pengelolaan tersebut antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara harmonis.

Kebijakan pembangunan wilayah pesisir berdasarkan kebijaksanaan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menetapkan Rencana Tata Ruang Kota Pasuruan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan pembangunan di daratan, dan di wilayah pesisir. Esensi tata ruang menurut Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 adalah Rencana Tata Ruang, Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Cara Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam pasal 13, 15 dan 17. Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan perumusan pemanfaatan/penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan.

Peraturan dan perundang - undangan yang bersifat sektoral dan belum operasional tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang ada, karena masing masing *stakeholder*, baik pemerintah (dalam hal ini lembaga / instansi) maupun pihak swasta dan masyarakat, berusaha memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir se-optimal mungkin sesuai dengan kepentingan masing - masing. Di samping itu kondisi alam (ketersediaan lahan, daya dukung lahan dan lingkungan) dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (respon masyarakat, tradisi dan kebiasaan yang sudah turun - temurun) juga perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Penyimpangan pemanfaatan ruang dari Rencana Tata Ruang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Dengan mempelajari konflik pemanfaatan ruang melalui pendekatan analisis spasial dan analisis konflik, akan dapat ditentukan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang yang optimal. Hasil kedua analisis tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam penentuan kebijakan (Gambar 1); sedangkan permasalahan kebijakan dalam pemanfaatan ruang diuraikan secara sistematik dalam Gambar 2.

METODOLOGI

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di wilayah pesisir Kota Pasuruan yang terdiri dari 9 desa / kelurahan, yaitu: Gadingrejo, Tamba'an, Trajeng, Tapa'an,Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo, Kepel dan Blandongan (Gambar 3).

Pengumpulan data

Data primer diperoleh dari survei, observasi dan wawancara secara langsung di lapangan; sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas atau Instansi terkait. Pengambilan responden dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan responden adalah aktor / pengguna lahan (*stakeholders*) yang dianggap memiliki keahlian atau yang memiliki kemampuan dan mengerti permasalahan terkait, serta yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis data

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan melalui analisis spasial dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), berdasarkan metode tumpang susun (*overlay*), pembobotan (*weighting*), pengharkatan (*scoring*) dan kelas (*class*) (Chrisman, 1997; Realino,1998).

Analisis spasial dilakukan terhadap 5 (lima) jenis penggunaan lahan, yaitu: industri, tambak, sawah, pemukiman dan konservasi. Setiap jenis penggunaan lahan dianalisis kesesuaiannya berdasarkan kriteria dan persyaratan penggunaan lahan, kemudian diidentifikasi secara terpisah dengan mempertimbangkan masing - masing faktor (parameter) pembatas. Klasifikasi suatu faktor pembatas bagi suatu peruntukan lahan disusun dalam bobot, harkat/skor dan kelas.

Bobot, harkat/skor dan kelas yang telah ditentukan, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu : Sangat Sesuai (S1), Sesuai (S2), Tidak Sesuai Saat Ini (N1) dan Tidak Sesuai Permanen (N2). Pemberian bobot setiap parameter terbesar 1,0 dan terkecil 0,8, sedangkan pemberian harkat/ skor pada setiap parameter ditetapkan tertinggi 25 dan terendah 10, dan untuk pemberian kelas pada setiap faktor pembatas ditentukan berdasarkan pada besarnya skor yang diperoleh. Skor tertinggi akan mendapatkan kelas 1, berikutnya 2 dan seterusnya sampai pada skor terendah mendapatkan kelas 4 (Tabel 1, 2, 3, 4, dan 5).

Metode Proses Hierarki Analitik (AHP)

Analisis kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi, dengan cara memilih/menentukan prioritas kegiatan/penggunaan lahan yang optimal,

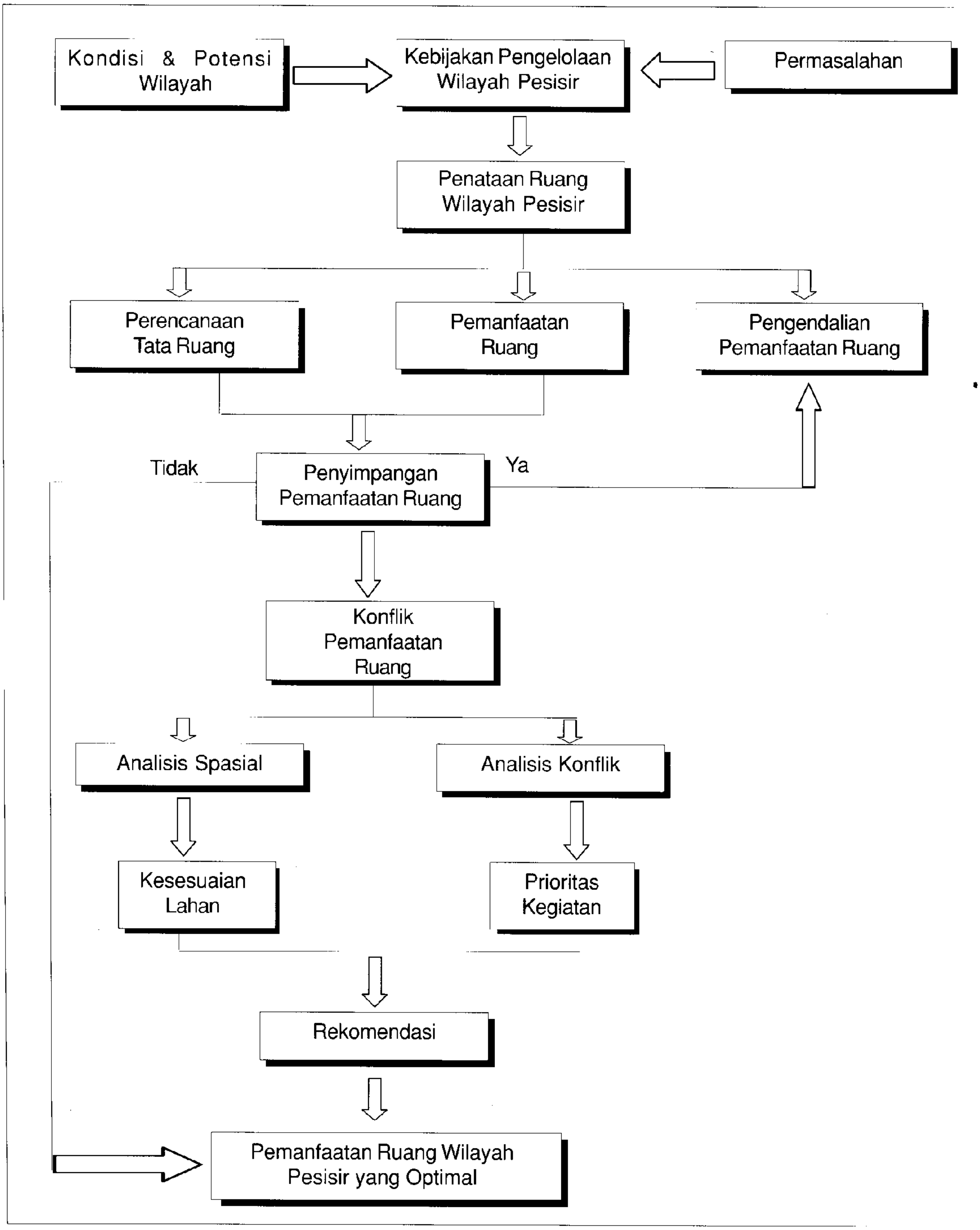

Gambar 1. Diagram kerangka pendekatan masalah

menggunakan pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP) dengan bantuan perangkat lunak 'Expert Choice'(Saaty, 1993,1994; Dunn, 1998; Tomboelu *et al*, 2000). Untuk dapat memberikan solusi yang diinginkan, ada 4 (empat) aspek yang dipertimbangkan, yaitu : aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan teknologi. Dari ke empat aspek tersebut terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keputusan pada pemilihan/penentuan prioritas penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan. Selanjutnya disusun struktur hierarki fungsionalnya.

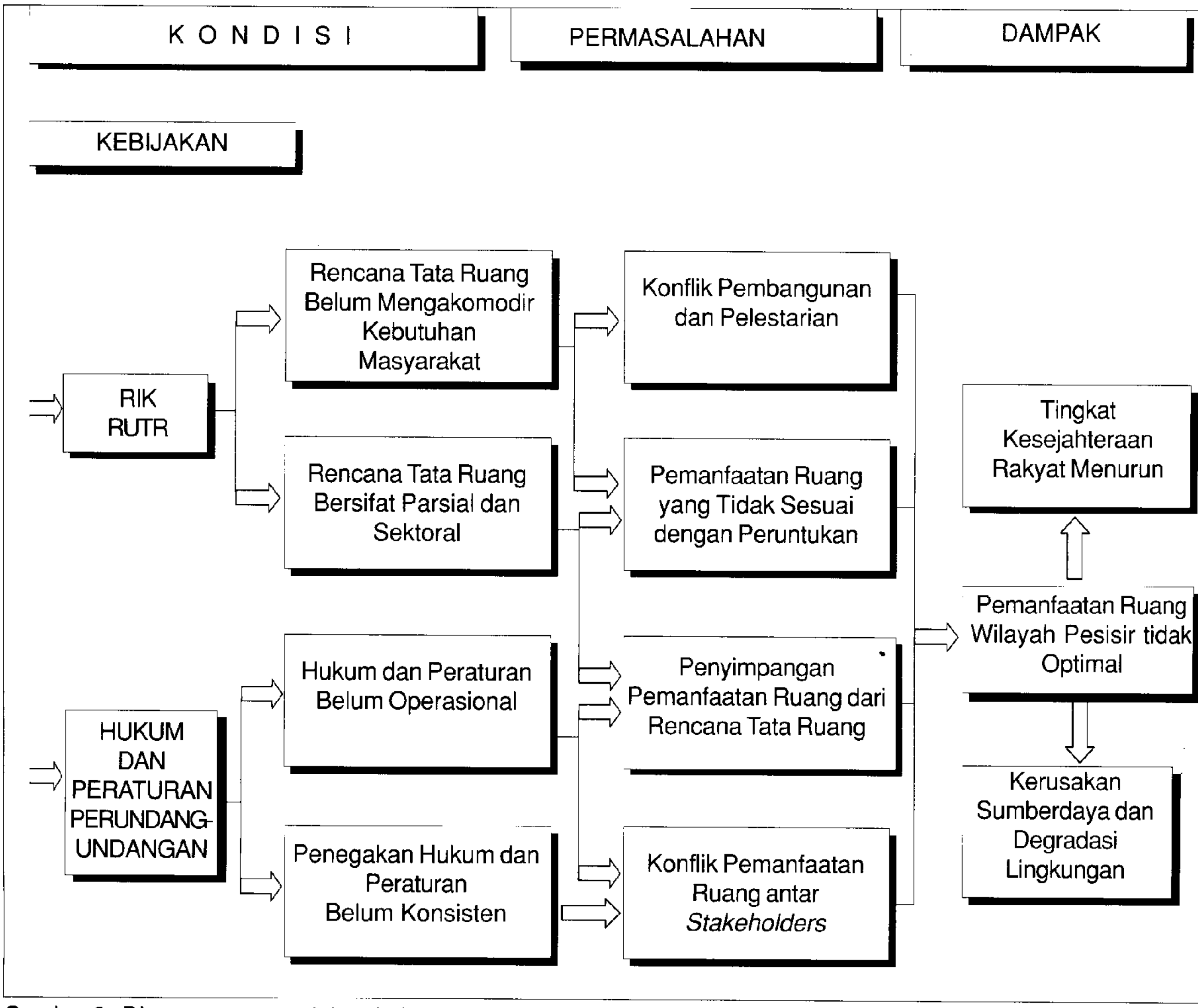

Gambar 2. Diagram permasalahan kebijakan dalam pemanfaatan ruang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi kesesuaian lahan

Dari hasil analisis kesesuaian lahan untuk masing-masing penggunaan lahan, diperoleh luas areal penggunaan lahan seperti yang dirinci dalam Tabel 6.

a. Tambak

Lokasi yang sangat sesuai untuk kawasan tambak berada di sebagian Desa Blandongan, Desa Kepel, Desa Tapa'an, Desa Panggungrejo, Desa Ngemplakrejo dan Tamba'an seluas 600,43 ha, dan lokasi yang sesuai berada di sebagian Desa Blandongan, Desa Kepel, Desa Tapa'an, Desa Tamba'an dan Desa Trajeng seluas 302,35 ha. Lokasi yang tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen, masing - masing berada pada sebagian Kelurahan Gadingrejo, Desa Trajeng, Desa Tamba'an, Desa Ngemplakrejo dan Mandaran-rejo seluas 152, 35 ha dan sebagian Desa Blandongan, Kelurahan Gadingrejo dan Desa Kepel seluas 188,87 ha (Gambar 4).

b. Industri

Lokasi yang sangat sesuai untuk kawasan industri seluas 185,18 ha berada di sebagian Desa Mandaranrejo, Desa Ngemplakrejo, Desa Trajeng, dan Kelurahan Gadingrejo, dan lokasi yang sesuai seluas 492,88 ha berada di sebagian Kelurahan Gadingrejo, Desa Trajeng, Desa Kepel, Desa Tapa'an dan Desa Tamba'an; sedangkan lokasi yang tidak sesuai saat ini seluas 57,22 ha berada di Desa Tamba'an, Desa Ngemplakrejo dan Desa Trajeng, sementara yang tidak sesuai permanen seluas 508,72 ha berada di sebagian Desa Panggungrejo, Desa Blandongan, Desa Kepel dan Desa Tapa'an (Gambar 5).

Tabel 1. Bobot, skor dan kelas penggunaan lahan untuk kategori kemiringan / lereng (%)

Kategori	**Sawah**			**Tambak**			**Industri**			**Konservasi**			**Pemukiman**		
	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K
0 - 2	0,8	17	2	1,0	25	1	0,9	16	3	1,0	25	1	0,9	17	3
3 - 8	0,8	20	1	1,0	14	3	0,9	22	1	1,0	10	4	0,9	22	1
9 - 15	0,8	15	3	1,0	10	4	0,9	19	2	1,0	10	4	0,9	20	2
> 16	0,8	12	4	1,0	10	4	0,9	10	4	1,0	10	4	0,9	15	4

Tabel 2. Bobot, skor dan kelas penggunaan lahan untuk kategori ketinggian (m)

Kategori	**Sawah**			**Tambak**			**Industri**			**Konservasi**			**Pemukiman**		
	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K
0 - 5	0,9	18	2	1,0	24	1	0,8	17	2	1,0	25	1	0,8	15	3
6 - 15	0,9	20	1	1,0	14	3	0,8	20	1	1,0	15	3	0,8	24	1
16 - 20	0,9	15	3	1,0	12	4	0,8	15	3	1,0	10	4	0,8	22	1
> 21	0,9	10	4	1,0	10	4	0,8	10	4	1,0	10	4	0,8	20	2

Tabel 3. Bobot, skor dan kelas penggunaan lahan untuk kategori kedalaman efektif tanah (cm)

Kategori	**Sawah**			**Tambak**			**Industri**			**Konservasi**			**Pemukiman**		
	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K
< 30	1,0	18	2	0,9	21	1	0,9	18	3	0,8	20	1	1,0	16	3
31 - 60	1,0	22	1	0,9	15	3	0,9	22	1	0,8	10	4	1,0	22	1
61 - 90	1,0	15	3	0,9	10	4	0,9	20	2	0,8	10	4	1,0	20	2
>91	1,0	10	4	0,9	10	4	0,9	10	4	0,8	10	4	1,0	12	4

Tabel 4. Bobot, skor dan kelas penggunaan lahan untuk kategori jenis tanah

Kategori	**Sawah**			**Tambak**			**Industri**			**Konservasi**			**Pemukiman**		
	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K
Aluvial pantai	1,0	12	4	1,0	22	1	-	-	-	0,9	20	1	-	-	-
Al. Hidro. Kel	1,0	22	1	1,0	15	3	-	-	-	0,9	10	4	-	-	-
Gleihumus	1,0	20	2	1,0	10	4	-	-	-	0,9	10	4	-	-	-
Regosol	1,0	15	3	1,0	10	4	-	-	-	0,9	10	4	-	-	-

Tabel 5. Bobot, skor dan kelas penggunaan lahan untuk kategori drainase

Kategori	**Sawah**			**Tambak**			**Industri**			**Konservasi**			**Pemukiman**		
	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K	B	S	K
Tergenang Periodik	1,0	12	4	1,0	24	1	1,0	14	3	1,0	24	1	1,0	14	3
Tidak Tergenang	1,0	22	1	1,0	10	4	1,0	20	1	1,0	10	4	1,0	20	1

Keterangan:

B : Bobot
S : Skor
K : Kelas

Kelas 1 : Sangat sesuai
Kelas 2 : Sesuai
Kelas 3 : Tidak sesuai saat ini
Kelas 4 : Tidak sesuai permanen

c. Pemukiman

Lokasi yang sangat sesuai untuk kawasan pemukiman seluas 112,92 ha berada di sebagian Kelurahan Gadingrejo dan Desa Trajeng, dan lokasi yang sesuai seluas 227,52 ha berada di sebagian Desa Kepel, Desa Blandongan, Desa Ngemplakrejo dan Kelurahan Gadingrejo; sedangkan lokasi yang tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen, masing - masing seluas 283,13 ha berada di lokasi Desa Kepel, Desa Trajeng, Desa Blandongan, Desa Tapa'an, Desa Mandaranrejo, Desa Ngemplakrejo, Desa Tamba'an dan Kelurahan Gadingrejo, dan seluas 620,42 ha berada di sebagian Kelurahan Gadingrejo, Desa Blandongan, Desa Kepel, Desa Tapa'an, Desa Ngemplakrejo, Desa Mandaranrejo, Desa Panggungrejo dan Desa Trajeng (Gambar 6).

d. Sawah

Lokasi yang sangat sesuai untuk kawasan pertanian sawah seluas 191,52 ha berada di sebagian Desa Blandongan, Kepel dan Tapaan, dan lokasi yang sesuai seluas 298,36 ha berada di sebagian Desa Kepel; sedangkan lokasi yang tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen, masing-masing seluas 27,65 ha berada pada lokasi Desa Trajeng, dan seluas 726,47 ha berada di Desa Panggungrejo (Gambar 7).

Tabel 6. Luas areal penggunaan lahan dari hasil analisis kesesuaian lahan (ha)

Kelas Kesesuian	Tambak	Industri	Pemukiman	Sawah	Konservasi
Sangat sesuai	600,43	185,18	112,92	191,52	220,42
Sesuai	302,35	492,88	227,52	298,36	16,54
Tidak sesuai saat ini	152,35	57,22	283,13	27,65	399,80
Tidak sesuai permanen	188,87	508,72	620,42	726,47	607,24

e. Konservasi

Lokasi yang sangat sesuai untuk kawasan konservasi seluas 220,42 ha berada di sebagian Desa Blandongan, Panggungrejo dan Tambaan, dan lokasi yang sesuai seluas 16,54 ha berada di sebagian Desa Kepel; sedangkan lokasi yang tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen, masing - masing seluas 399,80 ha berada di Desa Mandaranrejo dan seluas 607,24 ha berada di Desa Mandaranrejo dan Desa Gadingrejo (Gambar 8).

Berdasarkan hasil analisis spasial penggunaan lahan, dapat diidentifikasi konflik penggunaan lahan yang terjadi, yaitu : (1) konflik penggunaan lahan antara industri dan tambak di Kelurahan Gadingrejo, dan (2) konflik antara industri, pemukiman dan tambak di Desa Trajeng. Adapun faktor yang antara lain menyebabkan terjadinya konflik adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada.

2. Konflik pemanfaatan ruang

Dari hasil analisis AHP terhadap konflik yang terjadi, dan penilaian para *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat), memberikan nilai *Consistency Ratio* (CR) berkisar antara 0,03 s/d 0,11, sehingga dapat disimpulkan bahwa para *stakeholders* 'konsisten' dalam memberikan nilai pembobotan dengan tingkat penyimpangan yang kecil.

a Konflik antara industri dan tambak

Berdasarkan hasil analisis pendapat kelompok dalam penentuan prioritas penggunaan lahan bagi masing - masing *stakeholder* yang berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Kelurahan Gadingrejo, menunjukkan bahwa menurut persepsi pemerintah, prioritas pertama lokasi diperuntukkan bagi industri dengan nilai bobot 0,58 (Tabel 7). Apabila dilihat dari hierarki di atasnya (tingkat 3), faktor tertinggi adalah peningkatan pendapatan dengan nilai bobot 0,54 dan penyerapan tenaga kerja dengan nilai bobot 0,107. Jadi persepsi pemerintah dalam menentukan prioritas pertama bagi industri didasarkan pada pertimbangan aspek ekonomi dan sosial. Demikian pula persepsi swasta, prioritas pertama diperuntukkan bagi industri dengan nilai bobot 0,72 (Tabel 7). Akan tetapi bila dilihat dari hierarki di atasnya (tingkat 3), faktor tertinggi adalah eksploitasi sumberdaya dengan nilai bobot 0,68 dan ketersediaan lahan dengan nilai bobot 0,12. Dengan demikian

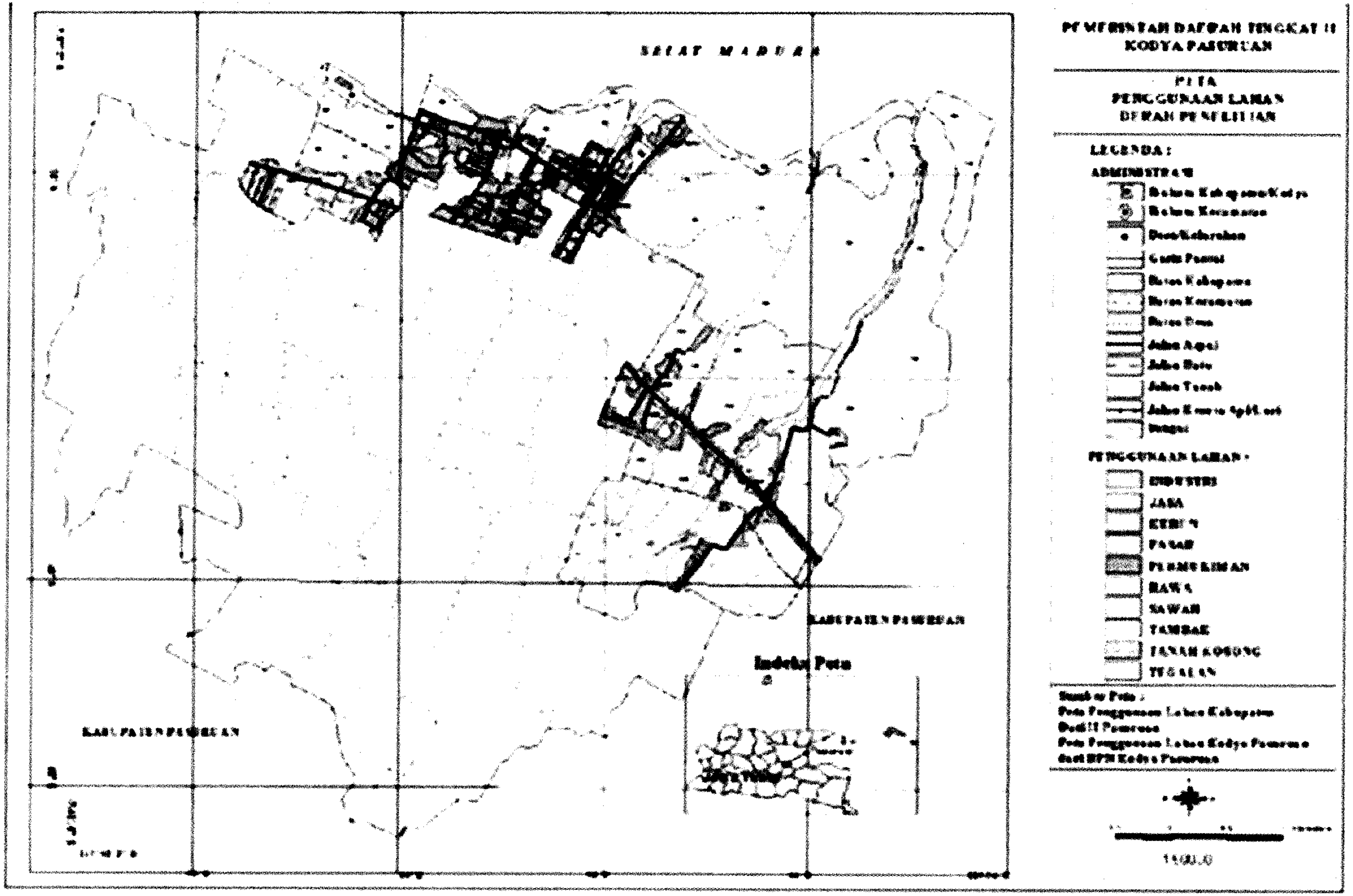

Gambar 3. Peta penggunaaan lahan wilayah pesisir di lokasi penelitian

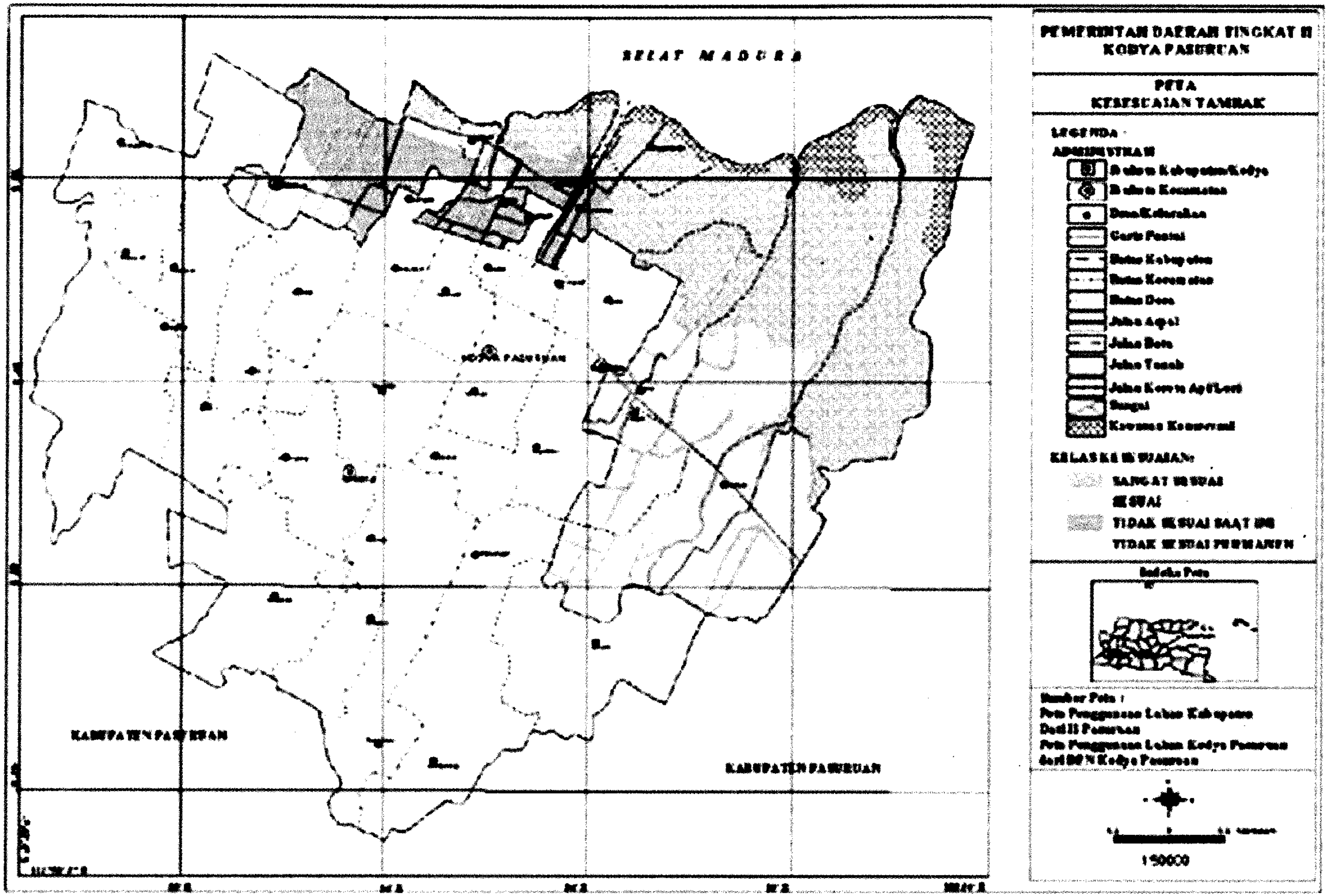

Gambar 4. Peta kesesuaian lahan untuk tambak

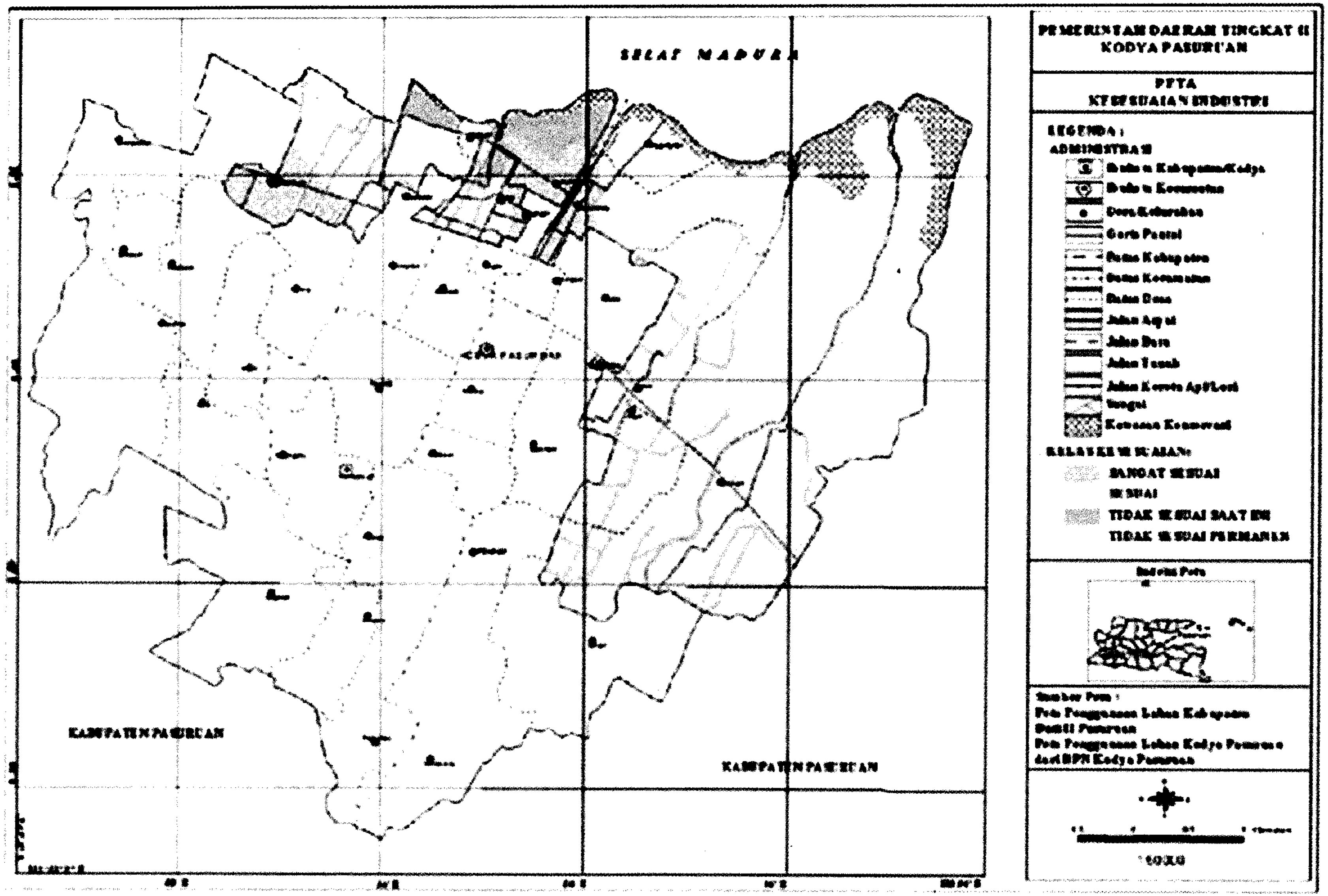

Gambar 5. Peta kesesuaian lahan untuk industri

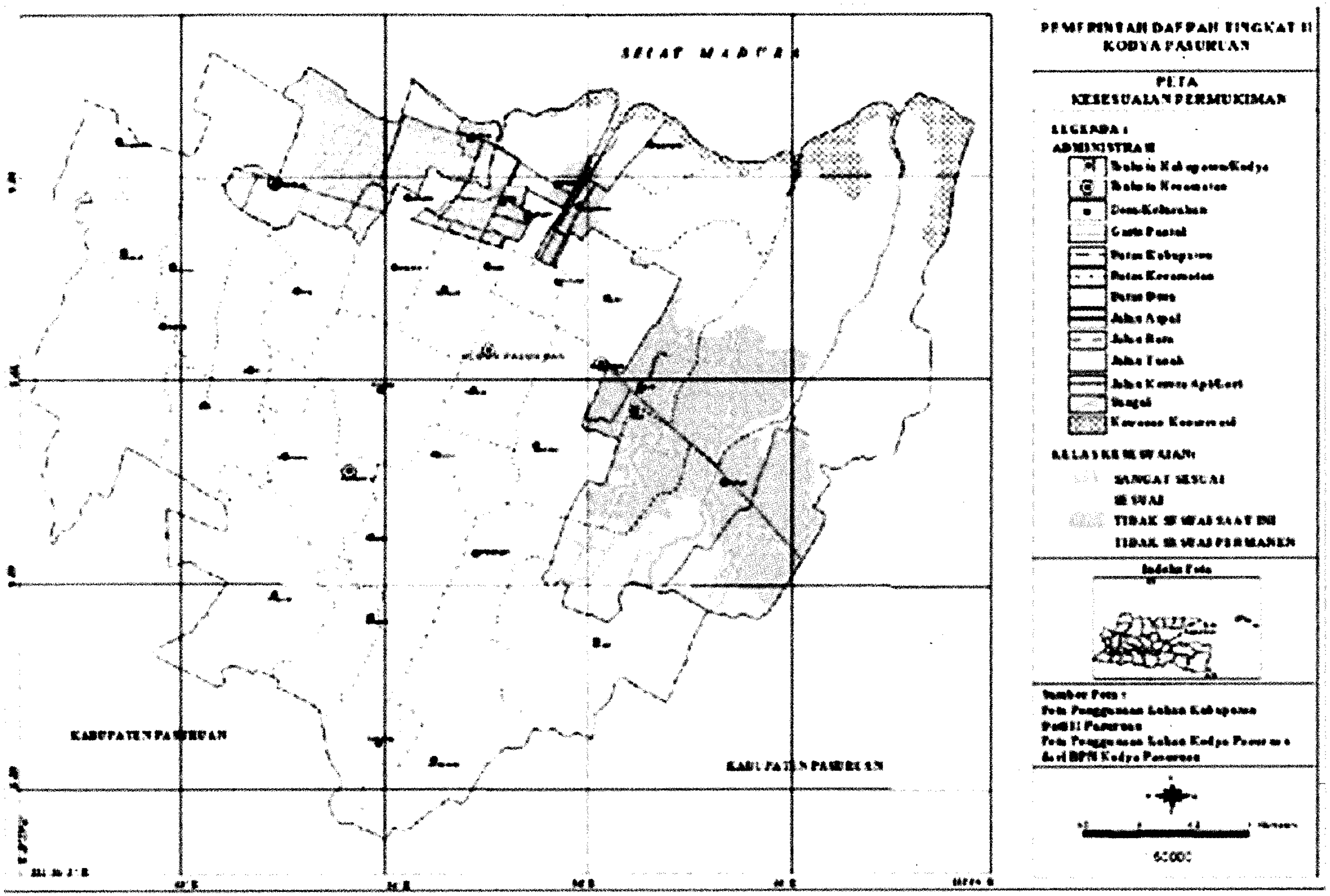

Gambar 6. Peta kesesuaian lahan untuk pemukiman

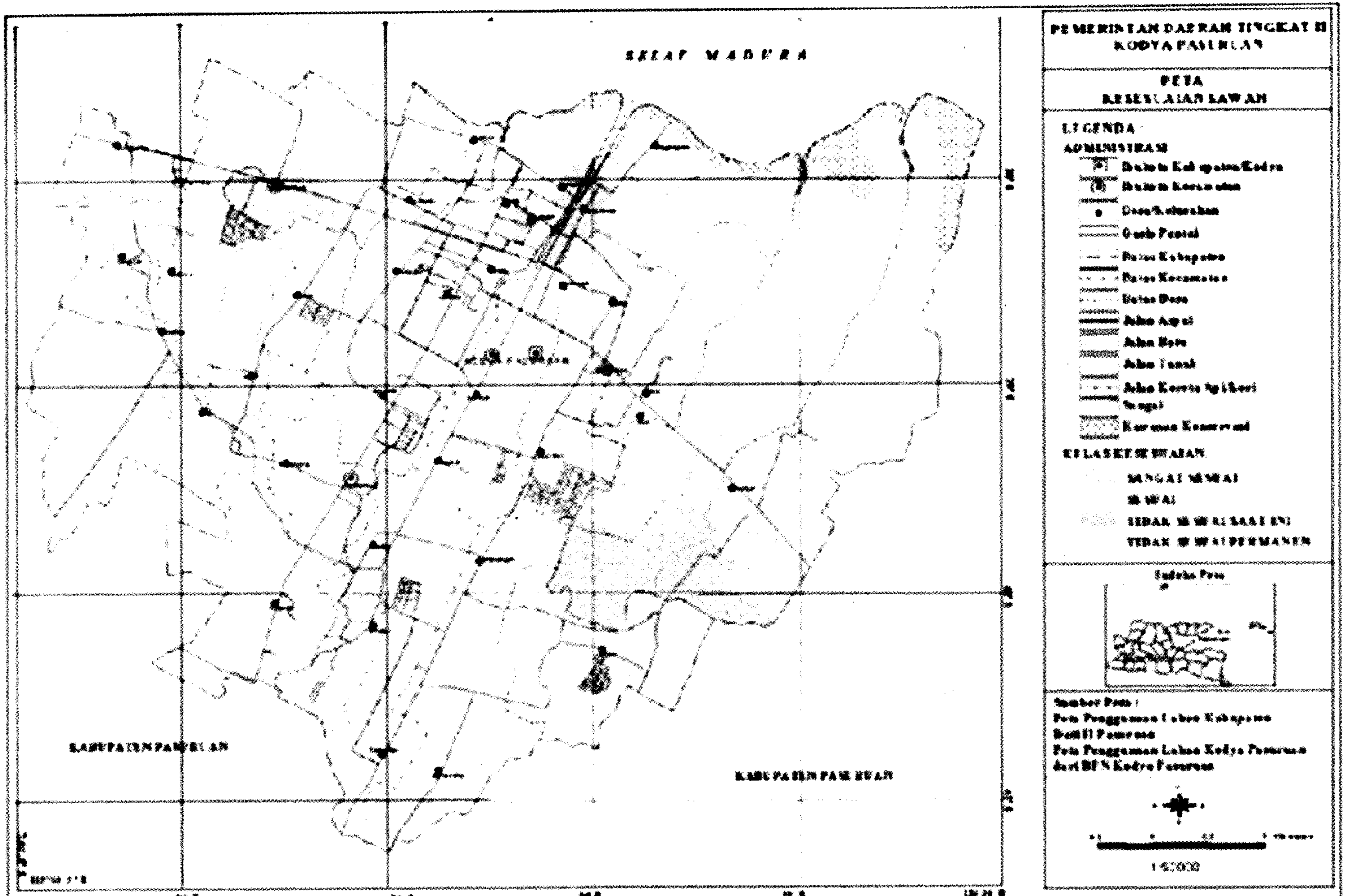

Gambar 7. Peta kesesuaian lahan untuk sawah

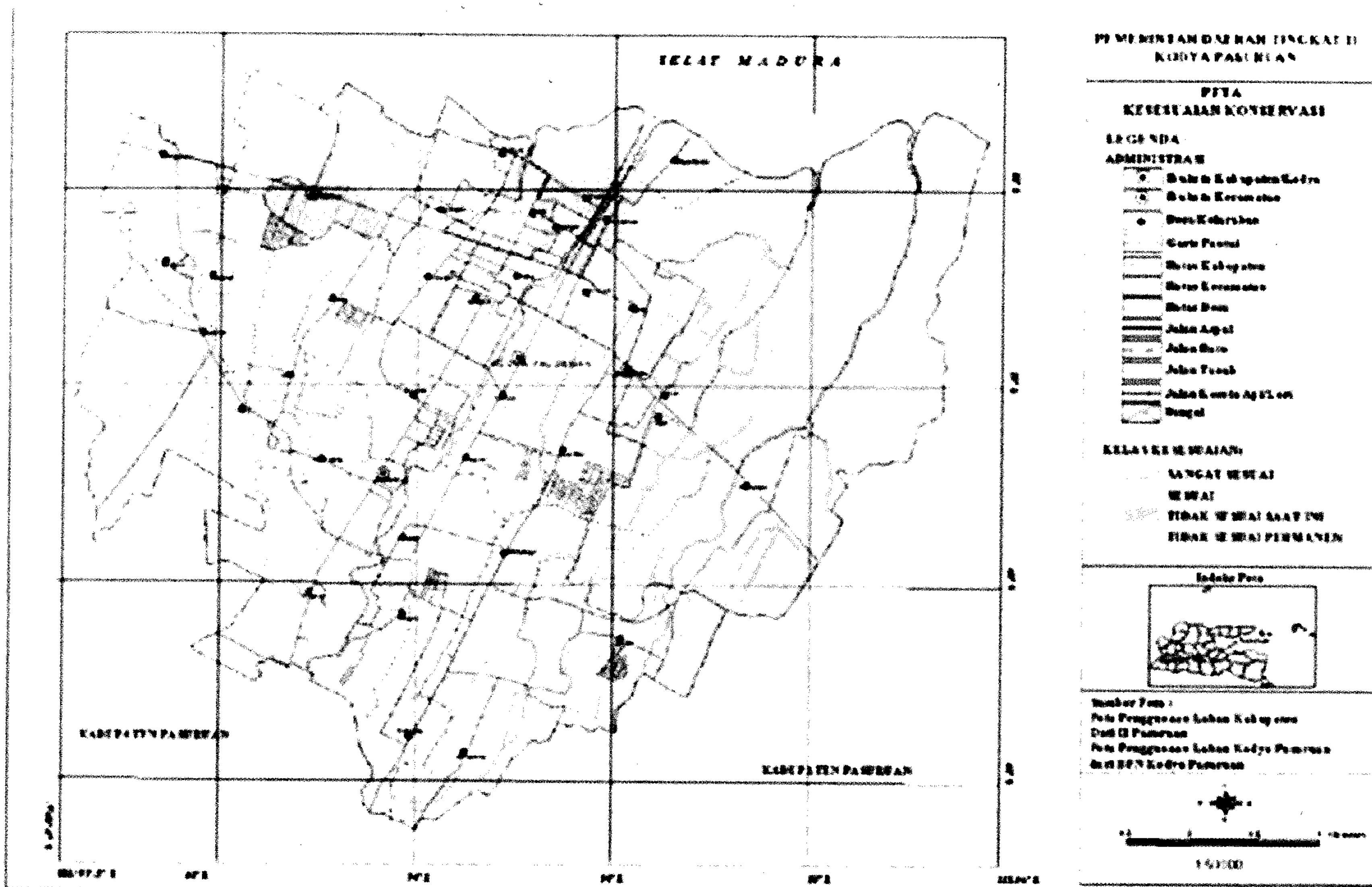

Gambar 8. Peta kesesuaian lahan untuk konservasi

persepsi swasta dalam menentukan prioritas pertama bagi industri didasarkan pada pertimbangan aspek ekonomi dan lingkungan. Sebaliknya berdasarkan persepsi masyarakat, prioritas pertama diperuntukkan bagi tambak dengan nilai bobot 0,76 (Tabel 7). Bila dilihat dari hierarki diatasnya (tingkat 3), faktor tertinggi adalah tradisi dan kebiasaan yang turun - temurun dengan nilai bobot 0,61, dan meningkatkan pendapatan dengan nilai bobot 0,09. Jadi persepsi masyarakat dalam menentukan prioritas pertama bagi tambak didasarkan pada pertimbangan aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis aspek dan faktor - faktor yang berpengaruh pada struktur hierarki pertama dan kedua terhadap penentuan prioritas penggunaan lahan, pertimbangan aspek ekonomi paling berperan dalam penggunaan lahan untuk industri dengan bobot sebesar 0,511, dan faktor yang sangat mempengaruhi adalah peningkatan pendapatan sebagai prioritas pertama dengan bobot 0,303 (Tabel 8 dan 9). Hal ini dimungkinkan karena adanya industri di wilayah tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat setempat. Faktor eksploitasi sumberdaya alam merupakan prioritas kedua dengan bobot 0,228, sedangkan prioritas ketiga adalah tumbuhnya sektor informal dengan bobot sebesar 0,129 (Tabel 8 dan 9). Diduga bahwa perkembangan industri memicu tumbuhnya sektor informal sebagai sektor penunjang.

Penggunaan lahan untuk tambak menunjukkan bahwa pertimbangan aspek sosial merupakan prioritas pertama dengan bobot sebesar 0,507, dan faktor yang sangat mempengaruhi aspek tersebut adalah faktor tradisi dan kebiasaan yang turun - temurun dengan bobot sebesar 0,197. Prioritas kedua adalah pendapatan masyarakat dengan bobot sebesar 0,178, sedangkan prioritas ketiga adalah penyerapan tenaga kerja dengan bobot sebesar 0,157 (Tabel 8 dan 9).

Tabel 7. Hasil analisis pendapat kelompok terhadap penentuan prioritas untuk masing-masing *stakeholders* di Kelurahan Gadingrejo

Penggunaan lahan	***Stakeholders***					
	Pemerintah		**Swasta**		**Masyarakat**	
	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas
INDUSTRI	0,58	1	0,72	1	0,24	2
TAMBAK	0,42	2	0,22	2	0,76	1

Berdasarkan hasil analisis pendapat gabungan pada penentuan prioritas penggunaan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Gadingrejo lebih diutamakan untuk industri dengan nilai bobot sebesar 0,529 yang didasarkan pada pertimbangan aspek ekonomi (meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat setempat), dengan nilai bobot sebesar 0,279, dan pertimbangan aspek sosial (penyerapan tenaga kerja) dengan nilai bobot sebesar 0,223 (Tabel 10; Gambar 9). Aspek ketiga yang cukup berpengaruh adalah aspek lingkungan (pencemaran), dimana industri - industri yang berkembang di daerah ini yang berpotensi menimbulkan pencemaran, diharuskan mengelola limbahnya baik padat maupun cair sebelum dibuang ke sungai atau laut.

b. Konflik antara industri, tambak dan pemukiman

Dengan cara yang sama pada analisis konflik penggunaan lahan di Kelurahan Gadingrejo, maka pada analisis konflik penggunaan lahan antara industri, pemukiman dan tambak di Desa Trajeng diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 11.

Berdasarkan hasil analisis hierarki, penggunaan lahan di Desa Trajeng diprioritaskan untuk industri dan tambak dengan nilai bobot masing-masing sebesar 0,344 dan 0,343 (Tabel 11; Gambar 10). Kedua kegiatan penggunaan lahan dapat dilakukan berdampingan, berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi (meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat setempat) dengan nilai bobot sebesar 0,258, pertimbangan aspek lingkungan (pencemaran limbah industri) dengan nilai bobot sebesar 0,179 (Tabel 11; Gambar 10). Industri - industri yang berkembang

Tabel 8. Hasil analisis pendapat terhadap pertimbangan aspek penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Kelurahan Gadingrejo

Penggunaan lahan	ASPEK							
	Ekonomi		Lingkungan		Sosial		Teknologi	
	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas
Industri	0.511	1	0.102	4	0.209	2	0.177	3
Tambak	0.311	2	0.127	3	0.507	1	0.055	4

Tabel 9. Hasil analisis pendapat terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Kelurahan Gadingrejo

FAKTOR	PENGGUNAAN LAHAN			
	Industri		Tambak	
	Bobot	Prioritas	Bobot	Prioritas
Pendapatan	0.303	1	0.178	2
Eksploitasi sumberdaya	0.228	2	0.137	4
Sektor informal	0.129	3	0.057	7
Pencemaran	0.111	4	0.085	6
Ketersediaan lahan	0.072	6	0.136	5
Tenaga kerja	0.075	5	0.157	3
Tradisi dan kebiasaan turun temurun	0.040	8	0.197	1
Transfer teknologi	0.042	7	0.055	8

Tabel 10. Hasil analisis hierarki pendapat gabungan pada penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Kelurahan Gadingrejo

Penggunaan Lahan	FAKTOR									
	E1 0.279	E2 0.063	E3 0.101	L1 0.191	L2 0.075	S1 0.223	S2 0.052	T 0.016	Bobot	Prioritas
Industri	0.303	0.228	0.129	0.303	0.303	0.303	0.303	0.303	0.529	1
Tambak	0.178	0.136	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.471	2

Keterangan:
E1: Pendapatan
E2: Eksploitasi sumberdaya
E3: Sektor informal
L1: Pencemaran
L2: Ketersediaan lahan
S1: Tenaga kerja
S2: Tradisi dan kebiasaan turun temurun
T: Transfer teknologi

Tabel 11. Hasil analisis hierarki pendapat gabungan pada penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Desa Trajeng

Penggunaan Lahan	FAKTOR									
	E1 0.258	E2 0.056	E3 0.112	L1 0.179	L2 0.084	S1 0.112	S2 0.170	T 0.028	Bobot	Prioritas
Industri	0.279	0.240	0.134	0.118	0.076	0.069	0.045	0.039	0.344	1
Tambak	0.176	0.116	0.048	0.099	0.083	0.125	0.265	0.088	0.343	1
Pemukiman	0.125	0.088	0.278	0.160	0.142	0.093	0.061	0.053	0.313	2

Keterangan:
E1: Pendapatan
E2: Eksploitasi sumberdaya
E3: Sektor informal
L1: Pencemaran
L2: Ketersediaan lahan
S1: Tenaga kerja
S2: Tradisi dan kebiasaan turun temurun
T: Transfer teknologi

di Desa Trajeng yang berpotensi menimbulkan pencemaran, diharuskan mengelola limbahnya baik padat maupun cair sebelum dibuang ke sungai atau laut. Aspek ketiga yang juga berpengaruh adalah aspek sosial (tradisi dan kebiasaan yang turun - temurun) dengan nilai bobot 0,170; sedangkan prioritas kedua diperuntukkan bagi pemukiman dengan nilai bobot 0,313 (Tabel 11; Gambar 10).

4. Analisis Kebijakan

Menurut Quade (1998), analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan menghasilkan informasi mengenai nilai - nilai dan serangkaian tindakan

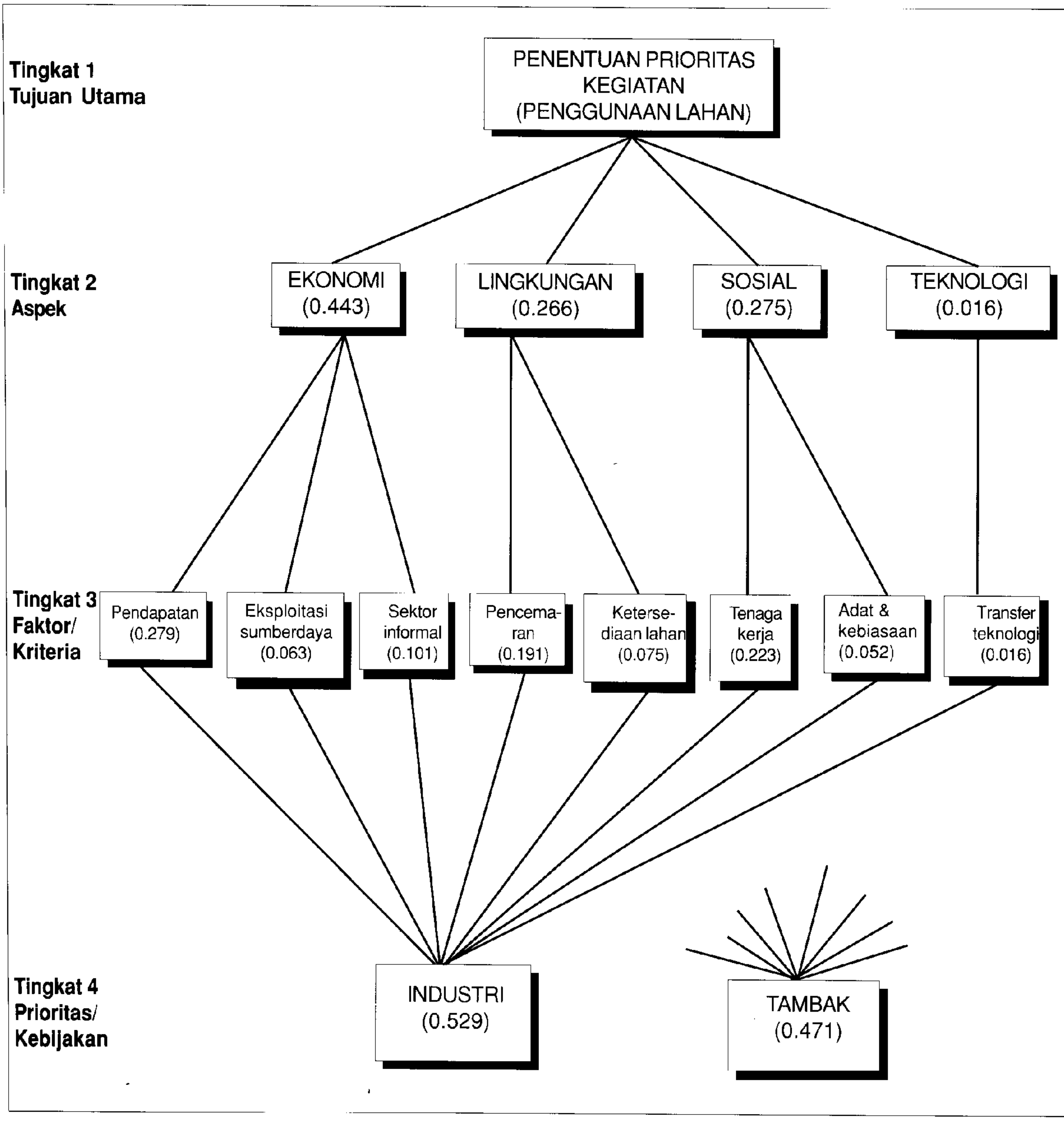

Gambar 9. Hasil analisis hierarki kegiatan industri dan tambak dalam penggunaan lahan wilayah pesisir di Kelurahan Gadingrejo, Pasuruan.

yang dipilih. Oleh karena itu analisis kebijakan dapat dilakukan melalui evaluasi dan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis hierarki terhadap konflik penggunaan lahan di Kelurahan Gadingrejo, dapat dikemukakan bahwa peruntukan lahan di Kelurahan Gadingrejo lebih diutamakan untuk kegiatan industri; sedangkan berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan lokasi tersebut sesuai untuk kegiatan industri dan tambak. Faktor penyebab terjadinya konflik di lokasi tersebut, karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang yang memperuntukkannya bagi kegiatan tambak. Dengan demikian dalam penentuan prioritas penggunaan lahan di Kelurahan Gadingrejo, dapat juga direkomendasikan untuk kegiatan industri sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi.

Demikian pula halnya dengan penggunaan lahan di Desa Trajeng, dimana lokasi tersebut dapat diprioritaskan untuk kegiatan industri dan tambak, karena kedua kegiatan memiliki tingkat

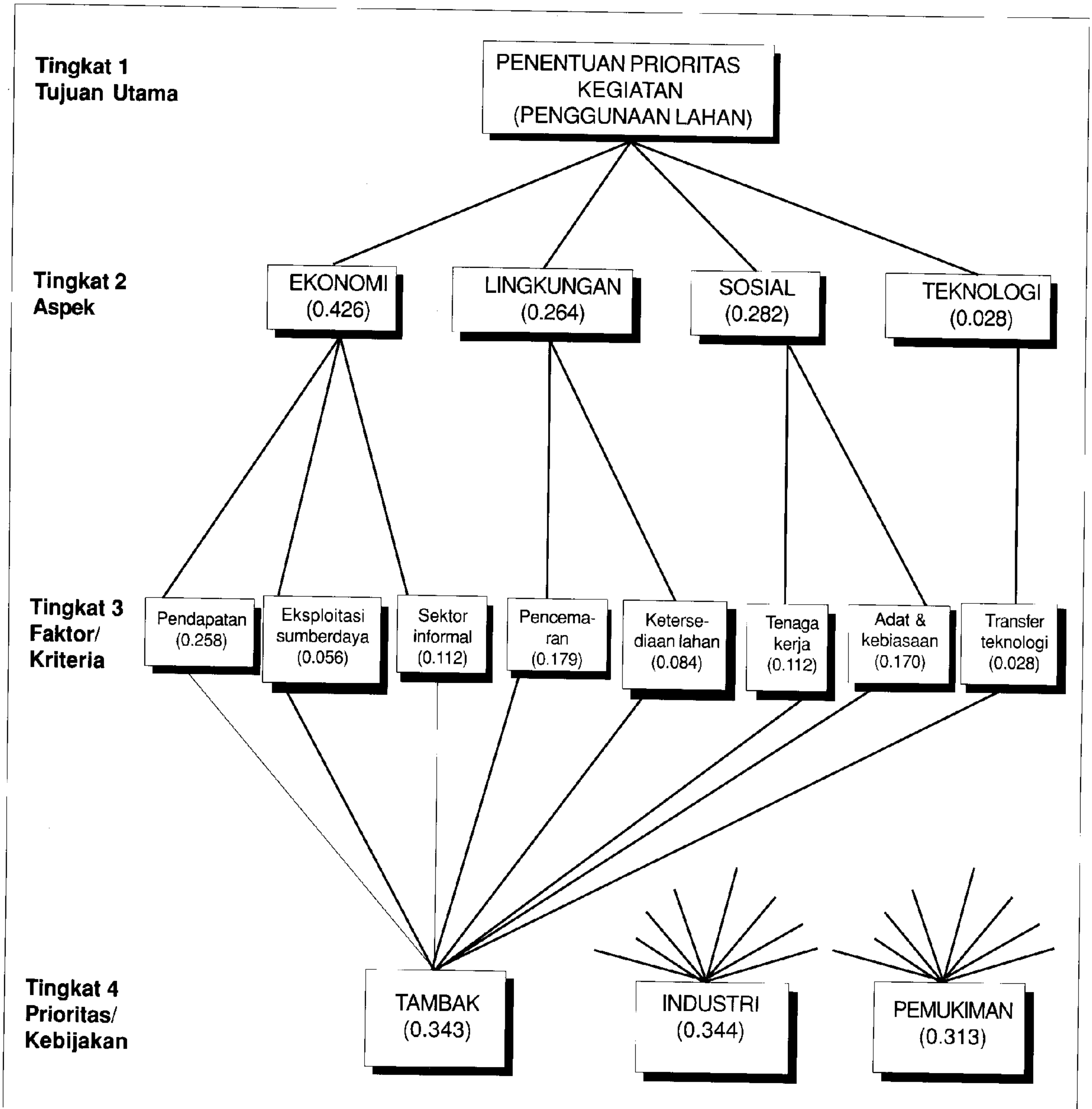

Gambar 10. Hasil analisis hierarki kegiatan tambak, industri, dan pemukiman dalam penggunaan lahan wilayah pesisir di Desa Trajeng, Pasuruan

kepentingan yang relatif sama baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Prioritas berikutnya dapat direkomendasikan untuk pemukiman, meskipun berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan lokasi tersebut sangat sesuai untuk industri, tapi juga sesuai untuk tambak dan pemukiman. Faktor penyebab terjadinya konflik di Desa Trajeng karena penggunaan lahan untuk tambak di lokasi tersebut tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang yang memprioritaskan untuk kegiatan industri dan pemukiman, dengan pertimbangan arah pengembangan pembangunan wilayah. Berdasarkan hasil analisis hierarki dan evaluasi serta pertimbangan arahan dari Rencana Tata Ruang Tahun 1994, maka penentuan prioritas penggunaan lahan dapat direkomendasikan untuk kegiatan industri dan tambak dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Trajeng.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan wilayah pesisir Kota Pasuruan, direkomendasikan kawasan yang sangat sesuai untuk dikembangkan bagi peruntukan tambak berada di sebagian besar Desa Blandongan, Desa Kepel, Desa Panggungrejo, Desa Ngemplakrejo dan Desa Tamba'an seluas 600,43 ha. Industri dapat dikembangkan di sebagian Desa Mandaranrejo, Desa Ngemplakrejo, Desa Trajeng dan Kelurahan Gadingrejo seluas 185,18 ha. Kawasan pemukiman dapat dikembangkan di sebagian Desa Trajeng dan Kelurahan Gadingrejo seluas 112,92 ha. Kawasan Pertanian Sawah berada di sebagian Desa Blandongan, Desa Kepel dan Desa Tapaan seluas 91,52 ha. Kawasan Konservasi berada di sebagian Desa Blandongan, Desa Panggungrejo dan Desa Tamba'an seluas 220,42 ha.
- Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir adalah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari Rencana Tata Ruang, dimana evaluasi hasil kesesuaian lahan menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang yang dibuat Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan wilayah.
- Persepsi pemerintah dan swasta terhadap penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Kelurahan Gadingrejo, lebih mengutamakan pada kegiatan industri dengan pertimbangan aspek ekonomi; sedangkan persepsi masyarakat lebih dominan untuk kegiatan tambak dengan pertimbangan aspek sosial, karena pengusahaan tambak merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun temurun.
- Persepsi pemerintah dan swasta terhadap penentuan prioritas penggunaan lahan wilayah pesisir di Desa Trajeng, lebih mengutamakan kepada kegiatan industri, kemudian tambak dan pemukiman; sedangkan persepsi masyarakat lebih mengutamakan kegiatan tambak dengan pertimbangan aspek sosial.
- Dengan mempertimbangan hasil evaluasi kesesuaian lahan, hasil analisis hierarki dan Rencana Tata Ruang serta kondisi perkembangan wilayah, maka lokasi di Kelurahan Gadingrejo dapat direkomendasikan bagi peruntukan kawasan industri, sedangkan kawasan tambak di sekitarnya yang masih produktif tetap dipertahankan peruntukannya. Lokasi di Desa Trajeng direkomendasikan untuk kawasan industri dan tambak, karena kedua kegiatan tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang relatif sama baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

SARAN

- Perlu dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang, karena Rencana Tata Ruang yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pembangunan wilayah.
- Perlu adanya sosialisasi Rencana Tata Ruang kepada masyarakat sebagai persiapan menghadapi perubahan dan perkembangan penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 1998. Evaluasi dan perencanaan sumberdaya pesisir dan kelautan Kotamadya Dati II Pasuruan Tahun 1995/1996. Bappeda Kotamadya Dati II Pasuruan.

Bengen, D.G. 2000. Sinopsis ekosistem dan sumberdaya alam pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Chrisman, N. 1997. Exploring Geographic Information System. John Willey & Sons, Inc. Washington.

Dunn, W.N. 1998. Analisa kebijakan publik: Kerangka analisa dan prosedur perumusan masalah. PT. Hanindita GrahaWidya. Yogyakarta. (Terjemahan)

Quade, E.S. 1998. Analysis for public decisions. North-Holland Publishing Co. New York.

Realino, B. 1998. Sistem Informasi Geografis dengan PC ArcInfo. Laboratorium RS, GIS & Geomatics, BPP Teknologi. Jakarta.

Saaty, T.L. 1993. Pengambilan keputusan bagi para pemimpin (proses hirarki analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi kompleks). P.T. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. (Terjemahan)

Saaty, T.L. 1994. Decision making in economic, political, social and technological environments with the analytical hierarchy process. University of Pittsburgh. USA.

Tomboelu, N., D.G. Bengen dan V.P.H. Nikijuluw. 2000. Analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya terumbu karang di Kawasan Bunaken dan sekitarnya, Sulawesi Utara. *Jurnal Pesisir & Lautan, 3(1): 51-67.*